PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Supriyadi Nomor 07 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 3550772Fax. (0358) 3550772
Email: dinsospppa@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR 188/ 60 /K/411.304/2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ,

Menimbang :

a. Bahwa diperlukan adanya mekanisme dalam upaya untuk mencapai target kinerja melalui formula-formula yang terukur. Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme capaian kinerja atau rencana aksi pencapaian kinerja oleh Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Nganjuk agar tujuan OPD dapat terwujud;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi demi terwujudnya akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, *Output* atau keluaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada Tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PPPA
KABUPATEN NGANJUK



NAFHAN TOHAWI,SH,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19721208 199803 1 005

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 188/ 60 /K/411.304/2023
tentang Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

SASARAN SRATEGIS PENCAPAIAN KINERJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	95%
		Persentase PMKS/PPKS menurun	3,87%
2	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	Persentase jumlah PSKS yang aktif	65%
3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	45%
4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%
		Persentase Kecamatan Layak Anak	15%

Ditetapkan di Nganjuk
pada Tanggal : 09 Januari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL PPPA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI,SH,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19721208 199803 1 005

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 188/ 60 /K/411.304/2023
tentang Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Program		Target Triwulan				Aksi Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/ Keluaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Angka	Satuan	I	II	III	IV		I	II	III	IV				
			100	%	25	25	25	25	Koordinasi dengan Bidang dan Menyusun LKPJ,LKjIP, LPPD, Lap. Penyerapan Anggaran dan Lap. Evaluasi Triwulan	√	√	√	√	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			100	%	25	25	25	25	Monev keg/Subkeg; Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	√	√	√	√	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

			100	%	25	25	25	25	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			100	%	25	25	25	25	Menyuusun Dokumen SPPD Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			100	%	25	25	25	25	Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi	-	-	-	√	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			100	%	25	25	25	25	Menyusun Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi	-	√	-	√	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

													an/Semesteran SKPD			
			100	%	25	25	25	25	Memanggil Instruktur Senam dan Melaksanakan Capacity Building	√	√	√	√	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			100	%	25	25	25	25	Menyediakan alat listrik, pemeliharaan jaringan listrik, fitting lampu, dan peralatan jaringan komputer	√	√	√	√	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			100	%	25	25	25	25	Menyediakan ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Baterai, Air Mineral dan Mamin Pegawai	√	√	√	√	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor

			100	%	25	25	25	25	Mencetak Buku Agenda, Stopmap Dinas, Amplop Dinas, Banner, Iklan ke Media Massa, Karangan Bunga Hidup serta memfasilitasi untuk fotocopy	√	√	√	√	Jumlah barang paket cetakan dan penggadaan yang disediakan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			100	%	25	25	25	25	Berlangganan Surat Kabar Jawa Pos	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			100	%	25	25	25	25	Menyediakan Makan dan Minum Tamu	√	√	√	√	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			100	%	25	25	25	25	Menyediakan Makan dan Minum Rapat	√	√	√	√	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

			100	%	25	25	25	25	Menyediakan pengadaan barang pompa, personal komputer, dan Peralatan Komputer	√	-	-	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			100	%	25	25	25	25	Melaksanakan Belanja Buku cek, Materai dan Melaksanakan Pengiriman Surat	√	√	√	√	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			100	%	25	25	25	25	Membayar Rekening Listrik, Telepon, dan Air	√	√	√	√	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			100	%	25	25	25	25	Bekerjasama dengan Cleaning Servis "Aqila Hamzah"	√	√	√	√	Jumlah laporan oenyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

			100	%	25	25	25	25	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas serta Pembayaran Pajak Kendaraan	√	√	√	√	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			100	%	25	25	25	25	Pemeliharaan Mebel	√	√	√	√	Jumlah Mebel yang Dipelihara			Pemeliharaan Mebel
			100	%	25	25	25	25	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dan Printer	√	√	√	√	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			100	%	25	25	25	25	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	√	√	√	√	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	Persentase jumlah PSKS yang aktif	85	%	-	42,5	-	42,5	Sosialisasi dan Penerbitan Rekomendasi terkait Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah	-	√	-	√	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

								dan Pengumpulan Uang atau Barang								
			85	%	28,3	28,3	28,4	-	Pembinaan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	√	√	√	-	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
			85	%	21,25	21,25	21,25	21,25	Pembinaan, Motivasi dan Koordinasi kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	√	√	√	√	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
			85	%	-	-	85	-	Pembinaan Kepada Karang Taruna	-	-	√	-	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota

	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	87	%	21,75	21,75	21,75	21,75	Penanganan PPKS di Rumah Singgah	√	√	√	√	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Persentase PMKS/ PPKS menurun	87	%	43,5	43,5			Pemberian Bansos Disabilitas	√	√	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usioa Terlantar, serta Gelandangan Penegemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			87	%	10	15	42	20	Penyaluran Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin di Kab. Nganjuk Sejumlah 4.068 Lansia	√	√	√	√	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
			87	%	21,75	21,75	21,75	21,75	Penanganan Layanan Kedaruratan PPKS	√	√	√	√	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan			Pemberian Layanan Kedaruratan

													Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			
			87	%	29	29	-	29	Pemberian Bahan Makanan bagi PPKS	√	√	-	√	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Penyediaan Permakanan
			87	%	21,75	21,75	21,75	21,75	Penanganan PPKS (ABH Pelaku, Korban, Saksi dan Anak Terlantar)	√	√	√	√	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
			87	%	29	29	29	-	Pelayanan Orang Terlantar	√	√	√	-	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

			87	%	-	-	87	-	Pemberian Bantuan Sosial bagi 21 LKSA	-	-	√	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota
			87	%	40	47	-	-	Pemberian Bimbingan Teknis bagi Operator DTKS Desa/ Kelurahan se Kab. Nganjuk Sejumlah 284 Orang	√	√	-	-	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
			87	%	10	15	62	-	Pemberian Bantuan Siswa Miskin bagi 354 Anak Sekolah	√	√	√	-	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

			87	%	21	22	22	22	Pemberian Paket Sembako kepada Korban Bencana Alam dan Sosial di Kab. Nganjuk	√	√	√	√	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Program Penanganan Bencana**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**	Penyediaan Makanan
	Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	Persentase jumlah PSKS yang aktif	85	%	21,25	21,25	21,25	21,25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	√	√	√	√	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	100	%	-	100	-	-	Rapat pembuatan buku pedoman PUG dan PPRG	-	√	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

			100	%	-	100	-	-	Sosialisasi Perbup Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender	-	√	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota
			100	%	-	100	-	-	Advokasi PUG dan PPRG bagi OPD, Desa dan Perguruan Tinggi	-	√	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

			100	%	-	100	-	-	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi OPD, Desa dan Perguruan Tinggi	-	√	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
			100	%	-	-	100	-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi	-	-	√	-	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi dan Kewenangan Kabupaten/ Kota		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

			100	%	-	-	-	100	Advokasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi	-	-	-	√	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			100	%	-	100	-	-	Advokasi Kebijakan dan pendampingan kepada organisasi perempuan, lembaga masyarakat dan perguruan tinggi	-	√	-	-	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

			100	%	20	40	20	20	Rapat peningkatan SDM bagi organisasi perempuan, lembaga masyarakat dan perguruan tinggi	√	√	√	√	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
			100	%	-	-	100	-	Rapat pembahasan dan Cetak Pembuatan buku saku dan pamflet sapa mama	-	-	√	-	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100	%	-	100	-	-	Pemberian Hibah kepada WCC	-	√	-	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	**Program Perlindungan Perempuan**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

			100	%	-	50	50	-	Rakor Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Monev Layanan Perlindungan Perempuan	-	√	√	-	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan/ Kota		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	100	%	-	-	100	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	-	-	√	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
			100	%	25	25	25	25	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	√	√	√	√	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga

													Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia			Kewenangan Kabupaten/ Kota
			100	%	-	-	100	-	Sosialisasi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	√	-	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
			100	%	-	-	-	100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	-	√	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya**	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

			100	%	-	100	-	-	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	-	√	-	-	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		**dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			100	%	10 0	-	-	-	Sosialisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	√	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

			100	%	25	25	25	25	Pelayanan Konseling / Parenting kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk	√	√	√	√	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	100	%	25	75	-	-	Sosialisasi Aplikasi Sistem Data Gender dan Anak (Si Danda) untuk pengumpulan Data Gender dan Anak	√	√	-	-	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota
			100	%	-	-	-	100	Menyusun Buku Profil Gender Kabupaten Nganjuk	-	-	-	√	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di

													Kewenangan Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Kecamatan Layak Anak	100	%	25	20	30	25	Pembinaan Forum Anak (Rekrutmen Fasilitator dan Pengurus), Pertemuan Rutin Forum Anak, Penguatan Kapasitas, Konsolidasi Forum Anak Kecamatan, Sosialisasi Organisasi Ramah Anak, dan Kegiatan 2P (Sehari Menjadi Dewan Anak)	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap	Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang	100	%	-	100	-	-	Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak pada 30 Perangkat Daerah	-	√	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/**	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan

	perempuan dan anak	difasilitasi penyelesaiannya											Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**Kota**	Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
			100	%	25	25	25	25	Sosialisasi Layanan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus untuk 25 Orang dan Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	√	√	√	√	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			100	%	100	-	-	-	Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Anak	√	-	-	-	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/

													Kewenangan Kabupaten/Kota			Kota
			100	%	-	-	100	-	Roadshow Perlindungan Anak di 3 Sekolah	-	-	√	-	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota

Ditetapkan di Nganjuk
pada Tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PPPA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI,SH,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19721208 199803 1 005